

Sidak Pasar Bandar Batauga, Bupati Buton Selatan H Muh Adios Cek Harga dan Pastikan Ketersediaan Sembako Tak Langka





Pantau langsung harga kebutuhan pokok di Pasar Bandar Batauga



Pastikan ketersediaan sembako tetap aman dan tidak langka



Antisipasi gangguan distribusi dan lonjakan harga



Dengar langsung keluhan dan informasi dari para pedagang



Jaga stabilitas pasokan pangan dan daya beli masyarakat



Pemerintah hadir memastikan kebutuhan pokok masyarakat terpenuhi

Pangan Aman, Masyarakat Sejahtera

Laporan: Firman, Baubau Post-Durasi Times

BUTON SELATAN, BP-Pemerintah Kabupaten Buton Selatan memperkuat pemantauan harga pangan di tingkat pasar untuk menjaga agar kebutuhan pokok masyarakat tetap tersedia dan dapat dibeli dengan harga yang wajar. Langkah itu dilakukan Bupati Buton Selatan H. Muhammad Adios, S.Sos., M.B.A., melalui inspeksi mendadak di Pasar Bandar Batauga, Jumat (11/9/2026).

Sidak tersebut tidak sekadar memantau aktivitas perdagangan. Adios mendatangi langsung sejumlah pedagang untuk memperoleh gambaran mengenai harga komoditas kebutuhan sehari-hari sekaligus mengecek ketersediaan pasokan sembilan bahan pokok (sembako). Pemerintah daerah ingin memastikan tidak terjadi gangguan distribusi

yang dapat membebani masyarakat.

“Kita ingin melihat langsung kondisi di lapangan, terutama harga dan ketersediaan bahan pokok. Jangan sampai masyarakat kesulitan mendapatkan kebutuhan pokok dengan harga yang terjangkau,” kata Adios saat berdialog dengan pedagang.

Selain menanyakan harga dan pasokan, Adios mengamati aktivitas jual beli dan

kondisi pasar secara umum. Menurut dia, informasi langsung dari pedagang penting sebagai bahan pemerintah daerah membaca perubahan kondisi perdagangan sebelum mengambil kebijakan.

“Kalau ada persoalan terkait harga maupun ketersediaan barang, tentu akan kita lihat dan segera mengambil langkah yang diperlukan. Pemerintah harus hadir memastikan kebutuhan

masyarakat tetap tersedia,” ujarnya.

Pemantauan harga pangan melalui pasar memiliki konteks panjang dalam kebijakan nasional. BULOG, misalnya, dibentuk pada 1967 dengan salah satu tujuan awal mengamankan penyediaan pangan dan stabilisasi harga. Pada 1969, mandatnya diarahkan secara khusus untuk stabilisasi harga beras nasional. Dalam perkembangan berikutnya, pemerintah juga menggunakan instrumen operasi pasar dan program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) untuk menjaga ketersediaan serta keterjangkauan

pangan di tingkat konsumen.

Dalam konteks Busel, sidak Pasar Bandar Batauga menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah mendapatkan data faktual dari lapangan. Hasil pemantauan akan menjadi bahan untuk melihat perkembangan harga dan stok sekaligus mengantisipasi persoalan pasokan yang berpotensi memengaruhi daya beli masyarakat.

“Pemerintah akan terus memantau perkembangan harga dan ketersediaan bahan pokok sebagai bagian dari upaya menjaga stabilitas pasokan

Lanjut ke Hal: 7

Reses Anggota DPRD Baubau H Masri Ungkap Jembatan Pulau Makassar Keropos, Pemprov Diminta Turun



Laporan: Prasetyo M

BAUBAU, BP-Keselamatan pengguna menjadi perhatian dalam reses Anggota DPRD Kota Baubau, Drs. Masri, M.Pd., setelah warga melaporkan kondisi jem-

batan penghubung Pulau Makassar yang mengalami keropos. DPRD Kota Baubau bersama Pemerintah Kota Baubau kini mendorong Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara mengambil

langkah penanganan karena infrastruktur tersebut berkaitan dengan kewenangan provinsi.

Selain jembatan, warga dalam reses yang berlangsung Rabu (9/9) juga mendesak perbaikan

layanan pengangkutan sampah dari Pulau Makassar menuju kawasan Lowu-Lowu. Aspirasi lain yang muncul menyangkut layanan kesehatan, kepesertaan BPJS Kesehatan, serta perubahan Desil yang berdampak terhadap penerimaan bantuan sosial masyarakat.

Masri mengatakan, layanan persampahan menjadi persoalan yang tidak kalah mendesak. Menurut dia, diperlukan kendaraan berukuran kecil atau armada pengangkut yang dapat beroperasi rutin agar sampah tidak menumpuk dan

Lanjut ke Hal: 7

DPRD Buteng Sahkan Perubahan APBD 2026, Infrastruktur Jadi Prioritas, 19 Ribu Rumah Tangga Dapat Bantuan



Laporan: Ardi

BUTON TENGAH, BP-Pemerintah Kabupaten Buton Tengah dan DPRD Buton Tengah menyepakati perubahan APBD 2026 dengan mengarahkan belanja pada percepatan infrastruktur strategis dan perlindungan sosial. Kesepakatan itu ditetapkan melalui

rapat paripurna DPRD di Buton Tengah, Selasa (8/9/2026), yang dihadiri Bupati Buton Tengah Dr. Azhari.

Sejumlah proyek yang mendapat dukungan anggaran berkaitan dengan akses konektivitas dan fasilitas publik. Pemerin-

Lanjut ke Hal: 7

Kolaborasi BPBD-Basarnas Baubau Latih LPM Batupoaro dan Betoambari Hadapi Risiko Bencana di Wilayah Pesisir



Laporan: Ardi

BAUBAU, BP-Kemampuan masyarakat menjadi penolong pertama dalam situasi darurat terus diperkuat di Kota Baubau. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) bersama Basarnas Baubau membekali utusan Lembaga Pem-

berdayaan Masyarakat (LPM) dari Kecamatan Batupoaro dan Betoambari dengan keterampilan mengoperasikan peralatan kebencanaan, terutama untuk menghadapi risiko kecelakaan di wilayah pesisir.

Pelatihan yang ber-

Lanjut ke Hal: 7

Bupati Buton Alvin Akawijaya Dorong Desa Winning dan Mantowu Siapkan Adaptasi Iklim



Laporan: La Harman

BUTON, BP-Pemerintah Kabupaten Buton mendorong desa memperkuat ketahanan masyarakat menghadapi risiko perubahan iklim melalui perencanaan berbasis komunitas. Langkah itu dibahas dalam Lokakarya Rencana Implementasi Adaptasi Perubahan Iklim di Balai Pertemuan Desa Winning, Kecamatan Pasarwajo, Selasa (1/9/2026), yang dihadiri Bupati Buton Alvin Akawijaya Putra.

Lokakarya tersebut menjadi tahap lanju-

Lanjut ke Hal: 7

Baleg Kejar RUU Reforma Agraria Rampung Sebelum Hari Tani



Laporan: Rahmat

JAKARTA, BP-Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menargetkan pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Reforma Agraria rampung sebelum 24 September 2026, bertepatan dengan Hari Tani Nasional. Target tersebut ditempuh melalui pembahasan intensif dengan akademisi, lembaga negara, organisasi masyarakat sipil, dan kelompok yang berkepentingan dengan persoalan pertanian.

Ketua Baleg DPR RI Bob Hasan mengatakan percepatan pembahasan bukan berarti parlemen mengabaikan substansi atau mengesampingkan masukan publik. Menurut dia, persoalan agraria yang telah berlangsung selama puluhan tahun membutuhkan kerangka hukum yang lebih menyeluruh agar berbagai konflik perantahan dapat ditangani.

“Targetnya akan seperti itu. Kita optimistis on schedule, karena sekarang prosesnya terus berjalan,” ujar Bob dalam keterangan resmi.

Salah satu alasan Baleg mendorong aturan khusus reforma agraria ialah masih adanya konflik yang melibatkan berbagai bentuk penguasaan lahan. Persoalan tersebut mencakup tanah negara, kawasan hutan, Hak Guna Usaha (HGU), Hak Pengelolaan (HPL), hingga konflik antara masyarakat dan perusahaan. Cakupan

konflik yang bersinggungan dengan sektor kehutanan dinilai tidak seluruhnya dapat diselesaikan melalui Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA).

“Kalau untuk RUU Reforma Agraria ini memang persoalannya bisa masuk ke ranah kehutanan, ranah yang di luar dari yang diatur dalam Undang-Undang Pokok Agraria. Itulah maknanya banyak yang tidak bisa menyelesaikan sengketa,” kata Bob.

Baleg menegaskan RUU Reforma Agraria tidak dimaksudkan untuk menggantikan UUPA. Rancangan tersebut justru diarahkan untuk melengkapi kerangka hukum yang sudah ada, terutama dalam menangani persoalan agraria struktural, mengurangi ketimpangan kepemilikan tanah, serta memberikan perlindungan kepada petani penggarap, buruh tani, nelayan, masyarakat adat, perempuan, dan kelompok marginal lainnya.

“Beda. Pengaturan Reforma Agraria dengan Undang-Undang Pokok Agraria itu beda,” ujar politikus Fraksi Partai Gerindra tersebut.

RUU itu telah disahkan sebagai RUU inisiatif DPR dalam Rapat Paripurna ke-5 Masa Sidang I Tahun Sidang 2026-2027 pada Selasa (8/9). Setelah tahap tersebut, Baleg melanjutkan pembahasan melalui rangkaian Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dan Rapat Dengar Pendapat (RDP).

Pada Rabu (9/9), Baleg mengundang sejumlah akademisi untuk memberikan pandangan mengenai substansi reforma agraria. Mereka antara lain pakar agraria, politik hukum pertanian, dan gerakan petani Iwan Nurdin; pakar agraria, politik pangan, dan perdesaan Universitas Brawijaya Idham Arsyad; Guru Besar Hukum Agraria Universitas Padjadjaran Ida Nurlinda; serta Guru Besar IPB Sudarsono Sedomo.

Sehari kemudian, Kamis (10/9), pembahasan diperluas melalui RDP dan RDPU dengan Sekretaris Mahkamah Agung, Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional, Ketua Umum Pengurus Ikatan Hakim Indonesia, serta Koordinator Advokasi Urban Poor Consortium Guntoro Gugun Muhammad. Masukan dari berbagai pihak tersebut menjadi bagian dari proses penyempurnaan rancangan sebelum pembahasan memasuki tahapan berikutnya.

Secara historis, persoalan agraria Indonesia memiliki akar hukum yang panjang. UUPA melalui UU Nomor 5 Tahun 1960 ditetapkan dan diundangkan pada 24 September 1960 sebagai dasar hukum agraria nasional. Undang-undang tersebut masih berlaku hingga kini.

Tanggal tersebut kemudian menjadi dasar peringatan Hari Tani Nasional yang ditetapkan melalui Keputusan Presiden Nomor 169 Tahun 1963.

Dalam konteks global, reforma agraria juga bukan isu baru. FAO mencatat reforma agraria menjadi agenda penting setelah Perang Dunia II, antara lain karena ketimpangan penguasaan tanah, konflik lahan, kemiskinan pedesaan, dan luasnya kelompok tanpa tanah. Konferensi Dunia tentang Reforma Agraria pada 1979 bahkan menghasilkan kerangka aksi yang menekankan akses dan penguasaan tanah bagi masyarakat miskin. Pada Februari 2026, isu tersebut kembali dibahas dalam ICAR+20 di Cartagena, Kolombia, dengan perhatian pada tata kelola tanah, hak perempuan, masyarakat adat, dan pembangunan pedesaan berkelanjutan.

Baleg kini menempatkan sejumlah agenda sebagai substansi utama RUU, yakni mengurangi ketimpangan kepemilikan tanah, menyediakan mekanisme hukum yang lebih komprehensif untuk menyelesaikan sengketa atau konflik agraria struktural, serta memperkuat perlindungan hak atas tanah bagi kelompok rentan. Dengan target penyelesaian sebelum 24 September, tantangan berikutnya ialah memastikan percepatan pembahasan tetap berjalan seiring dengan kualitas regulasi dan penyerapan aspirasi publik. (*)

DPR Desak Bea Cukai Bongkar Jaringan Rokok Ilegal hingga Produsen



Laporan: Alwan

JAKARTA, BP-Komisi III DPR RI meminta Bea Cukai tidak berhenti menindak pengecer dalam pemberantasan rokok ilegal. Penegakan hukum dinilai harus diarahkan hingga produsen, distributor besar, pemodal, dan pihak yang menjadi penerima manfaat akhir agar mata rantai peredaran barang kena cukai (BKC) ilegal dapat diputus.

Desakan tersebut mengemuka setelah Bea Cukai Jakarta mencatat penindakan terhadap sekitar 59,8 juta batang rokok ilegal sepanjang 2026, dengan estimasi potensi kerugian negara mencapai Rp46,79 miliar. Jumlah itu meningkat sekitar 257 persen dibandingkan periode yang sama pada 2025 yang mencapai 23 juta batang.

Anggota Komisi III DPR RI Syarifuddin Sudding mengatakan peredaran rokok tanpa cukai masih ditemukan di berbagai daerah, terutama kawasan industri. Menurut dia, persoalan tersebut tidak hanya menyangkut penerimaan negara, tetapi juga kesehatan masyarakat dan keadilan dalam persaingan usaha.

“Kalau perlu kita ingin lebih jauh, bagaimana tidak hanya pada tingkat pengecer tapi juga produsennya. Produsennya yang menerima manfaat dari rokok-rokok ilegal ini harus dimintai pertanggungjawaban hukum,” ujar Sudding.

Pandangan serupa disampaikan Anggota Komisi III DPR RI Abdullah. Ia menilai pelaku usaha legal berada dalam posisi yang tidak seimbang karena harus memenuhi kewajiban cukai dan berbagai ketentuan usaha, sedangkan produsen serta distributor

ilegal dapat menghindari beban tersebut.

“Akibatnya, bukan hanya negara yang dirugikan, tetapi banyak pihak dalam rantai pasok industri rokok yang menjalankan usahanya secara legal,” kata Abdullah dalam keterangannya, Jumat (11/9).

Abdullah juga meminta penegak hukum mengikuti aliran uang dari bisnis rokok ilegal. Langkah tersebut diperlukan untuk mengungkap pihak yang mendanai kegiatan tersebut sekaligus memastikan keuntungan dari peredaran rokok ilegal tidak dialihkan untuk membiayai aktivitas ilegal lainnya.

Kepala Kantor Wilayah Bea Cukai Jakarta Hendri Darnadi memastikan jajarannya akan memperluas penindakan hingga ke pihak yang berada di balik jaringan tersebut. “Komitmen kami adalah akan kejar sampai ujungnya untuk memberikan efek jera. Kami kejar sampai penerima manfaat akhir. Semoga jadi template baru dalam proses penindakan atau penyidikan rokok ilegal,” kata Hendri.

Secara historis, persoalan cukai tembakau di Indonesia telah lama berkaitan dengan penerimaan negara sekaligus pengendalian konsumsi. Data WHO menunjukkan penerimaan cukai produk tembakau Indonesia pada 2019 mencapai sekitar Rp213,27 triliun, menunjukkan besarnya posisi cukai tembakau dalam kebijakan fiskal.

Pada tingkat global, perdagangan tembakau ilegal juga bukan persoalan baru. WHO pada 2024 memperkirakan pasar rokok ilegal dunia mencapai sekitar 11,6 persen dari pasar rokok, setara dengan sekitar 657 miliar batang per tahun dan kehilangan penerimaan

sekitar US\$40,5 miliar. WHO juga mencatat perdagangan ilegal membuat produk tembakau lebih murah dan mudah diakses.

Karena itu, pemberantasan rokok ilegal berkembang dari sekadar operasi penyitaan menjadi upaya penelusuran rantai pasok dan penerima manfaat. Protokol WHO untuk menghapus perdagangan ilegal produk tembakau bahkan mulai berlaku secara internasional pada 2018 dan mendorong negara-negara memperkuat kerja sama, termasuk melalui sistem pelacakan dan penelusuran produk.

Hendri mengatakan semangat pemberantasan rokok ilegal pada dasarnya sama di seluruh jajaran Bea Cukai, meskipun pola dan kecepatan penindakan dapat berbeda sesuai karakteristik setiap wilayah. “Bea Cukai di mana pun spiritnya sama. Ibaratnya multinational company, kita punya yang disebut congruent goal, sama dan sebangun tujuannya. Speed yang berbeda, tidak berarti spiritnya berbeda,” ujarnya.

Bagi Komisi III DPR, penindakan yang menyeluruh diperlukan untuk melindungi penerimaan negara, industri yang patuh terhadap aturan, serta masyarakat. Penelusuran sampai produsen dan pemodal dinilai menjadi bagian penting agar operasi pemberantasan tidak sekadar menghasilkan penyitaan barang, tetapi juga mampu memutus sumber pembiayaan dan jaringan distribusi rokok ilegal. (*)

Hugua Dorong RUU Daerah Kepulauan Perkuat Fiskal dan Konektivitas Sultra



Laporan: Mashuri

SULTRA, BP- Per- soalannya konektivitas, tingginya biaya pelayanan publik, pemerataan pembangunan, dan kebutuhan afirmasi fiskal menjadi perhatian Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Daerah Kepulauan. Masukan itu disampaikan Wakil Gubernur Sultra Hugua saat menerima kunjungan kerja Panitia Khusus (Pansus) DPR dan DPD RI di Ruang Pola Kantor Gubernur Sultra, Jumat (11/9/2026).

Hugua menilai karakter geografis Sultra harus menjadi dasar dalam merumuskan kebijakan bagi daerah kepulauan. Sultra terdiri atas 17 kabupaten/kota, dengan sebagian besar memiliki wilayah kepulauan. Kondisi tersebut membuat pembangunan tidak hanya bergantung pada potensi ekonomi, tetapi juga kemampuan menyediakan transportasi, logistik, infrastruktur, dan pelayanan publik yang menjangkau pulau-pulau.

Dari sisi ekonomi, sektor pertanian dalam arti luas menjadi penyumbang sekitar 23 persen terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Sultra. Kontribusi berikutnya berasal dari pertambangan sekitar 20 persen dan perdagangan sekitar 18 persen. Menurut Hugua, struktur tersebut menunjukkan perlunya kebijakan yang dapat mengoptimalkan potensi ekonomi sekaligus mengurangi beban geografis yang dihadapi daerah kepulauan.

"Kalau undang-undang ini diundangkan,

kami berharap dapat memberikan efek terhadap pertumbuhan ekonomi sekaligus memperkuat kebijakan fiskal bagi daerah kepulauan," kata Hugua. Ia menyebut pertumbuhan ekonomi, pemerataan pembangunan, dan keseimbangan lingkungan sebagai tiga agenda yang perlu mendapat perhatian dalam RUU tersebut.

Konektivitas antarpulau menjadi salah satu persoalan yang dianggap paling mendasar. Jarak geografis dan ketergantungan terhadap transportasi laut membuat distribusi barang serta penyelenggaraan pelayanan masyarakat membutuhkan biaya lebih tinggi dibandingkan wilayah yang memiliki akses darat lebih mudah. "Yang diperlukan adalah infrastruktur, dukungan konektivitas dan logistik. Pada akhirnya, ini berkaitan dengan bagaimana kebijakan fiskal dapat memberikan ruang bagi daerah kepulauan," ujar Hugua.

Masukan Sultra tersebut sejalan dengan pembahasan Pansus mengenai kemungkinan skema pendanaan khusus bagi daerah kepulauan. Dalam pembahasan di DPR pada awal September 2026, Ketua Pansus RUU Daerah Kepulauan DPR RI Mercy Christy Barends menyebut Dana Khusus Kepulauan (DKK) didorong sebagai afirmasi fiskal di luar Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK), karena skema yang ada dinilai belum sepenuhnya menjawab karakter geografis daerah kepulauan.

Ketua Pansus RUU Daerah Kepulauan DPR RI Mercy Chri-

esty Barends mengatakan, kunjungan ke Sultra dilakukan untuk memperoleh masukan langsung dari pemerintah daerah dan pemangku kepentingan sebelum pembahasan memasuki tahap finalisasi. Ia menegaskan RUU tersebut tidak diarahkan untuk membentuk daerah otonom baru, melainkan memberikan pengaturan yang lebih sesuai bagi wilayah yang memiliki karakteristik kepulauan.

"Undang-undang ini tidak melahirkan sistem baru atau daerah otonom baru. Undang-undang ini memberikan perhatian terhadap kekhususan daerah-daerah yang memiliki ciri kepulauan," jelas Mercy. Pansus juga membuka pembahasan terhadap sejumlah regulasi terkait agar pengaturan mengenai daerah kepulauan tidak tumpang tindih.

Secara historis, gagasan mengenai regulasi khusus daerah kepulauan bukan perkara baru. RUU tersebut telah menjadi agenda legislasi selama bertahun-tahun dan pernah masuk Prolegnas Prioritas 2022 sebagai RUU usul inisiatif DPD RI. Dokumen DPR mencatat pembahasan RUU Daerah Kepulauan telah berlangsung sekitar dua dekade, menunjukkan panjangnya perdebatan mengenai kewenangan, pengelolaan wilayah laut, pembangunan, dan pembiayaan daerah kepulauan.

Persoalan yang dihadapi Sultra juga memiliki kemiripan dengan tantangan negara-negara kepulauan di dunia. Perserikatan Bangsa-Bangsa sejak Konferensi Lingkungan dan Pembangunan di Rio de Janeiro

pada 1992 mengakui negara-negara kepulauan kecil sebagai kelompok dengan persoalan khusus dalam pembangunan. Faktor keterpencilan, tingginya biaya transportasi, keterbatasan sumber daya, serta kerentanan terhadap perubahan iklim membuat konektivitas dan pembiayaan menjadi isu penting dalam pembangunan wilayah kepulauan.

Dalam konteks global, isu tersebut terus berkembang. Konferensi PBB keempat tentang Small Island Developing States (SIDS) di Antigua dan Barbuda pada Mei 2024 menghasilkan agenda pembangunan 10 tahun baru yang menekankan penguatan ketahanan negara-negara kepulauan. PBB juga menempatkan konektivitas antarpulau, transportasi laut dan udara, infrastruktur, serta akses terhadap pasar sebagai bagian penting dari pembangunan berkelanjutan wilayah kepulauan.

Karena itu, Mercy berharap aspirasi Sultra dapat memperkaya substansi RUU, terutama mengenai pengelolaan sumber daya, pemerintahan, pembangunan, ekonomi, pelayanan publik, konektivitas, serta perlindungan pesisir dan pulau-pulau kecil. Kunjungan tersebut turut dihadiri anggota Pansus DPR RI Jaelani, Taufan Pawe, Ali Mazi, Julie S. Laiskodat, Hendry Munief dan Teuku Ibrahim, anggota DPD RI M. Z. Amirul Tamim dan Hidayatullah Sjah, Pj. Sekda Sultra, kepala OPD lingkup Pemprov Sultra, akademisi UHO, serta perwakilan organisasi masyarakat. (*)

Gubernur Sultra Andi Sumangerukka Pastikan Penataan Aset Tak Ganggu Pendidikan Ummusshabri



SULTRA, BP- Gubernur Sulawesi Tenggara Andi Sumangerukka memastikan penataan aset Pemerintah Provinsi Sultra yang selama ini dimanfaatkan Yayasan Ummusshabri di Kendari tidak akan berujung pada pengambilalihan yayasan ataupun penghentian kegiatan pendidikan. Pemerintah memilih penyelesaian bersama yayasan setelah memperoleh pendapat hukum dari Kejaksaan.

Penegasan itu disampaikan Andi saat bersilaturahmi dengan keluarga besar Yayasan Ummusshabri di Kendari, Kamis (10/9/2026). Ia mengatakan persoalan tersebut harus dilihat sebagai bagian dari penertiban aset daerah, bukan sebagai upaya mengambil alih lembaga pendidikan yang telah puluhan tahun beraktivitas di lokasi tersebut.

Menurut Andi, Pemprov Sultra saat ini memetakan sekitar 800 aset daerah yang menjadi perhatian Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan kemudian mendapat perhatian Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pemerintah memilah aset yang dapat segera dituntaskan, dan Ummusshabri termasuk salah satunya.

"Dari 800 aset itu, mana yang bisa dilakukan secara cepat. Salah satunya Ummusshabri," kata Andi.

Kekhawatiran muncul setelah penataan aset tersebut berkembang menjadi informasi bahwa pemerintah akan mengambil alih yayasan, menyingkirkan para guru, bahkan merobohkan fasilitas pendidikan. Andi membantah anggapan tersebut dan menegaskan kegiatan belajar-mengajar tetap menjadi perhatian dalam proses penyelesaian.

"Tidak ada cerita nanti pemerintah mengambil alih, terus guru-gurunya disingkirkan semua. Bukan begitu. Itu omong kosong," tegasnya.

Secara historis, Ummusshabri merupakan salah satu lembaga pendidikan Islam yang memiliki akar panjang di Sulawesi Tenggara. Pesantren tersebut diprakarsai Gerakan Usaha Pembaruan Pendidikan Islam (GUPPI) Konsulat Sultra pada 1971. Kegiatan belajar-mengajar dimulai pada 1 Januari 1973 dengan 58 santri laki-laki tingkat Madrasah Aliyah, sebelum diresmikan Menteri Agama Prof. H.A. Mukti Ali pada 9 Januari 1974.

Perjalanan itu berlangsung ketika pendidikan madrasah di Indonesia juga memasuki fase penataan nasional. Pada 1975, pemerintah menerbitkan SKB Tiga Menteri yang mengatur peningkatan mutu pendidikan madrasah dan mem-

perkuat posisi pendidikan agama dalam sistem pendidikan nasional.

Dalam perjalanannya, Ummusshabri mengembangkan jenjang pendidikan secara bertahap, mulai dari Madrasah Aliyah pada 1973, Madrasah Tsanawiyah pada 1987, Madrasah Ibtidaiyah pada 1996, hingga PAUD pada 2013. Perkembangan tersebut membuat Ummusshabri menjadi salah satu institusi pendidikan Islam yang cukup dikenal di Sultra.

Persoalan aset sendiri berkaitan dengan status lahan yang digunakan yayasan. Berdasarkan riwayat pengelolaan yang disampaikan yayasan, Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sultra pada 1993 menerbitkan SK Nomor 130 Tahun 1993 yang menyerahkan pengelolaan tanah milik pemerintah provinsi seluas 72.109 meter persegi kepada Pimpinan Pesantren Ummusshabri untuk dimanfaatkan dan dipelihara bagi pengembangan pesantren. Tanah tersebut tetap tercatat sebagai inventaris pemerintah daerah.

Andi mengatakan Pemprov Sultra telah meminta pendapat hukum kepada Kejaksaan sebagai dasar menentukan langkah berikutnya. Pemerintah dan yayasan akan membahas kemampuan yayasan, bentuk kontribusi, serta mekanisme kerja sama pemanfaatan aset yang sesuai ketentuan. Ia menekankan penyelesaian tidak boleh membebani salah satu pihak secara tidak proporsional.

"Supaya nanti tidak bermasalah dengan pengganti saya, maka duduklah sama-sama, sehingga itu nanti harus dihasilkan kerja sama yang proporsional dan tidak saling merugikan," ujarnya.

Ketua Yayasan Ummusshabri Kendari Supriyanto mengatakan lembaga tersebut telah berusia 55 tahun dan sempat menghadapi masa sulit pada 1999-2012. Saat itu, jumlah peserta didik di berbagai jenjang berada di bawah 300 orang, sedangkan sejumlah fasilitas pendidikan dan asrama mengalami keterbatasan. Yayasan kemudian berupaya mempertahankan pendidikan secara mandiri setelah dukungan sejumlah pihak berkurang. Supriyanto berharap penyelesaian aset dapat memberikan kepastian hukum tanpa mengganggu keberlanjutan pendidikan Ummusshabri.

Andi mengapresiasi kontribusi Ummusshabri dalam mengelola lahan pemerintah menjadi fasilitas pendidikan selama puluhan tahun. Ia menilai optimalisasi aset daerah penting untuk memperkuat kemandirian pemerintah, tetapi prosesnya harus tetap mempertimbangkan keberadaan lembaga pendidikan. "Kita harus mandiri. Kalau kita tidak bisa mandiri, jangan berharap. Salah satunya, aset yang 800 itu harus kita kelola untuk adanya kemandirian," katanya. Dalam kunjungan tersebut, Andi disambut para siswa dan siswi yang berjejer di lapangan sekolah. (*)

Sosialisasikan PBM 2006, Bupati Azhari Dorong Kerukunan Aktif di Buton Tengah, Bukan Sekadar Bebas Konflik



Laporan:Ardi

BUTON TENGAH, BP- Pemerintah Kabupaten Buton Tengah mendorong kerukunan umat beragama tidak berhenti sebagai konsep untuk mencegah konflik, tetapi diwujudkan melalui sikap aktif saling menghormati dan menjaga persaudaraan. Pesan itu mengemuka dalam sosialisasi Peraturan Bersama Menteri (PBM) Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan 8 Tahun 2006 yang digelar Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Buton Tengah di Hotel Findi, Kecamatan Lakudo, Rabu (9/9/2026).

Bupati Buton Tengah Dr. H. Azhari, S.STP., M.Si., mengatakan masyarakat yang hidup dalam keberagaman membutuhkan kesadaran bersama untuk menjaga hubungan sosial. Menurut dia, suasana aman dan kondusif bukan hanya menjadi tujuan, tetapi juga prasyarat agar pembangunan daerah dapat berlangsung secara optimal.

“Kerukunan bukan sekadar keadaan tanpa konflik, melainkan sikap bersama untuk menghormati perbe-

daan dan menjaga persaudaraan,” kata Azhari.

Ia menilai keberagaman yang terdapat di Buton Tengah semestinya ditempatkan sebagai kekuatan sosial. Karena itu, perbedaan keyakinan tidak boleh menjadi alasan bagi masyarakat untuk membangun jarak, melainkan menjadi ruang untuk memperkuat hubungan antarsesama.

“Kita semua adalah keluarga. Mari senantiasa menjaga kerukunan, saling menghormati, dan merawat persatuan,” ujar Azhari.

Sosialisasi tersebut sekaligus memperkuat pemahaman mengenai tugas kepala daerah dalam memelihara kerukunan umat beragama. PBM Nomor 9 dan 8 Tahun 2006 yang diterbitkan pada 21 Maret 2006 mengatur antara lain pemeliharaan kerukunan, pemberdayaan FKUB, serta pendirian rumah ibadah. Regulasi itu juga menempatkan FKUB sebagai wadah dialog, penampung aspirasi, sosialisasi kebijakan, dan pemberian rekomendasi terkait pendirian rumah ibadah.

Secara historis, lahirnya PBM tersebut tidak terlepas dari panjangnya upaya Indonesia membangun tata kelola hubungan antarumat beragama. Sebelum PBM 2006, pemerintah telah memiliki sejumlah regulasi dan forum dialog lintas agama. Kajian Kementerian Agama mencatat, dialog antarpemuka agama telah berkembang sejak 1960-an dan kemudian melahirkan berbagai bentuk forum komunikasi yang menjadi bagian dari proses pembentukan FKUB.

Konteks itu menunjukkan bahwa kerukunan bukan persoalan yang hanya dihadapi satu daerah. Di tingkat internasional, hubungan antaragama juga menjadi perhatian penting dalam membangun perdamaian sosial. Dialog lintas iman berkembang sebagai salah satu pendekatan untuk mencegah prasangka, memperkuat saling pengertian, dan membangun kerja sama di tengah masyarakat yang majemuk.

Dalam PBM tersebut, FKUB kabupaten/kota memiliki tugas melakukan dialog dengan pemuka agama

dan tokoh masyarakat, menampung serta menyalurkan aspirasi masyarakat, melakukan sosialisasi peraturan dan kebijakan di bidang keagamaan, serta memberikan rekomendasi tertulis atas permohonan pendirian rumah ibadah.

Karena itu, sosialisasi di Buton Tengah diarahkan agar ketentuan tersebut tidak berhenti sebagai pengetahuan normatif. FKUB bersama pemerintah daerah mendorong nilai saling menghormati, saling percaya dan persaudaraan diterapkan dalam interaksi sehari-hari sehingga keberagaman dapat menjadi modal sosial untuk menjaga stabilitas sekaligus menopang pembangunan daerah.

Azhari menegaskan, pembangunan akan lebih mudah dijalankan ketika masyarakat berada dalam suasana damai dan memiliki kepercayaan satu sama lain. “Pembangunan daerah akan berjalan baik apabila masyarakatnya hidup dalam suasana yang aman, damai, dan saling percaya,” katanya. (*)

Wabup Syarifudin: Kemajuan Buton Harus Dibarengi Penguatan Karakter



Laporan:La Harman

BUTON, BP- Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW di Desa Banabungi, Kecamatan Pasarwajo, Kabupaten Buton, tidak sekadar menjadi agenda keagamaan. Wakil Bupati Buton Syarifudin Saafa, ST, menjadikannya momentum untuk mendorong penguatan karakter dan akhlak masyarakat sebagai bagian dari pembangunan sumber daya manusia di daerah.

Pesan itu disampaikan Syarifudin ketika menghadiri peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW di Masjid Nurul Huda, Desa Banabungi, Kamis malam, 3 September 2026. Peringatan tersebut mengangkat tema “Teladan Nabi, Akhlak Mulia, Bekal Diri Menuju Selamat Bahagia” dan diikuti masyarakat setempat serta tamu undangan.

Menurut Syarifudin, kemajuan daerah tidak dapat hanya diukur melalui pembangunan infrastruktur. Kualitas manusia yang memiliki karakter, akhlak, serta landasan keagamaan juga menjadi modal penting agar pembangunan memberikan manfaat yang lebih luas dan berkelanjutan.

“Cara membenengi suatu daerah adalah dengan mengadakan acara yang seperti ini, majelis zikir dan ilmu. Pembinaan karakter tidak bisa lepas dari kegiatan keagamaan seperti ini,” kata Syarifudin.

Ia mengajak masyarakat menjadikan Rasulullah SAW sebagai rujukan dalam membangun perilaku kehidupan sehari-hari. Salah satu

sifat yang dinilai penting untuk diteladani adalah kejujuran dan amanah, sebagaimana sosok Nabi Muhammad SAW yang dikenal dengan julukan Al-Amin, atau orang yang dapat dipercaya.

“Peningkatan sumber daya manusia, bagaimana menumbuhkan karakter, akhlak yang sesuai dengan ajaran agama kita sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW,” ujarnya.

Syarifudin juga mengaitkan penguatan karakter tersebut dengan visi Buton sebagai daerah yang religius. Menurut dia, kegiatan keagamaan seperti majelis zikir dan ilmu dapat menjadi ruang pembinaan masyarakat sekaligus memperkuat hubungan sosial di tengah kehidupan bermasyarakat.

“Dengan agama yang kuat, akan menyelamatkan kita di dunia dan akhirat,” katanya.

Peringatan Maulid di Masjid Nurul Huda berlangsung khidmat sekaligus meriah. Majelis Taklim Nurul Hidayah Desa Banabungi mempersembahkan selawat Nabi, sedangkan siswa-siswi SD Negeri 25 Buton menampilkan tarian dan vokal grup Islami. Anak-anak juga antusias mengikuti tradisi berebut telur dari pohon male yang telah menjadi bagian dari peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW di Banabungi setiap tahun.

Secara historis, peringatan Maulid telah berkembang dalam tradisi mas-

yarakat Muslim selama berabad-abad. Sejumlah sumber sejarah mencatat adanya peringatan kelahiran Nabi di Madinah dan Makkah pada masa Abbasiyah, sementara riwayat lain menyebut perayaan besar berkembang pada masa Dinasti Fatimiyah dan kemudian dilakukan secara luas oleh penguasa Muslim di berbagai wilayah. Karena itu, sejarah awal Maulid memiliki sejumlah versi di kalangan sejarawan.

Di Indonesia, Maulid kemudian tumbuh menjadi tradisi keagamaan sekaligus sosial yang memiliki bentuk beragam di setiap daerah. Peringatan digelar di masjid, pesantren, majelis taklim hingga lingkungan masyarakat dengan bentuk kegiatan seperti selawatan, pengajian dan tradisi lokal. Tradisi tersebut memperlihatkan bagaimana penghormatan terhadap Nabi Muhammad SAW beradaptasi dengan kebudayaan masyarakat setempat.

Bagi masyarakat Banabungi, tradisi itu kembali dihidupkan melalui pertemuan warga, selawat, penampilan seni Islami dan tradisi telur male. Di tengah rangkaian tersebut, pesan Wabup Buton menempatkan Maulid bukan hanya sebagai peringatan sejarah kelahiran Rasulullah SAW, tetapi juga sebagai sarana menanamkan keteladanan, kejujuran, amanah, dan akhlak kepada generasi berikutnya. (*)

PM2,5 di Bandara Soetta Tembus 63 Âµg/mÂ³, Kemenkes Minta Warga Waspada



Peliput: Andina L

JAKARTA, BP- Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI memperketat pemantauan kualitas udara setelah erupsi Gunung Anak Krakatau memicu sebaran abu vulkanik di sejumlah wilayah. Di tengah kembali berjalannya aktivitas penerbangan, pengukuran Kemenkes menemukan konsentrasi partikulat halus PM2,5 masih berada di atas batas aman pada sejumlah titik, termasuk kawasan Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten.

Pemantauan langsung dilakukan Wakil Menteri Kesehatan Prof. Dante Saksono Harbuwono di sejumlah titik Bandara Soekarno-Hatta pada Rabu (9/9/2026). Menggunakan particulate counter, petugas mengukur konsentrasi partikulat yang berukuran sangat kecil dan berpotensi masuk jauh ke saluran pernapasan.

Di Terminal Damri Bandara Soekarno-Hatta, konsentrasi PM2,5 tercatat mencapai 63 mikrogram per meter kubik (Âµg/mÂ³), sedangkan batas aman yang digunakan dalam pemantauan tersebut sebesar 25 Âµg/mÂ³. “Mungkin kalau untuk otoritas bandara itu menggunakan paper test untuk

keamanan penerbangan, tapi ternyata particulate matter untuk kesehatannya masih tinggi,” kata Dante.

Kondisi tersebut menunjukkan adanya perbedaan antara aspek keselamatan penerbangan dan risiko kesehatan akibat paparan partikulat. Menurut Dante, partikel yang lebih besar dapat mulai berkurang, tetapi PM2,5 tetap perlu mendapat perhatian karena tidak selalu terlihat oleh mata. “Untuk kesehatan, itu kita pakai yang 2,5. Kalau nanti partikel yang lebih besar kita anggap sudah mulai menurun, tapi 2,5nya masih ada, masih tinggi,” ujarnya.

Berdasarkan pemantauan pada 8 September 2026, sejumlah titik di Bandara Soekarno-Hatta dan wilayah sekitarnya juga menunjukkan konsentrasi PM2,5 dan PM10 melampaui batas aman. Pengukuran dilakukan secara berkala oleh Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan (BBKK) dan Balai Kekarantinaan Kesehatan (BKK) menggunakan Air Quality Detector atau Particulate Counter.

Dampak kesehatan dari paparan abu vulkanik menjadi perhatian karena material erupsi mengandung partikulat dengan berbagai ukuran. Hingga 6 September

2026, Kemenkes mencatat 16.759 kasus Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) secara kumulatif di wilayah terdampak abu vulkanik Gunung Anak Krakatau yang tersebar di empat provinsi dan 23 kabupaten/kota. Sebanyak 3.771 kasus terjadi pada anak usia 0-5 tahun dan 12.988 kasus pada usia di atas lima tahun.

Kemenkes menyebutkan kejadian ISPA pada 2026 lebih tinggi dibandingkan periode yang sama pada 2025. Karena itu, masyarakat diminta tidak menganggap berjalannya kembali aktivitas penerbangan sebagai tanda bahwa risiko kesehatan akibat abu vulkanik telah sepenuhnya berakhir.

“Yang paling penting adalah bahwa masyarakat tetap harus waspada. Walaupun bandara sekarang sudah dibuka, ternyata masalah kesehatan dari pengukuran particulate counter ini masih terus berdampak untuk kesehatan,” ujar Dante.

Anjuran terutama ditujukan kepada masyarakat yang masih harus beraktivitas di luar ruangan. Kemenkes meminta warga menggunakan masker, mengurangi paparan abu vulkanik, dan membatasi aktivitas di luar rumah ketika kualitas udara belum membaik. “Misalnya stay at home, kemudian

menggunakan masker, kalau ada gejala datang ke fasilitas kesehatan,” kata Dante.

Peringatan lebih ketat diberikan kepada kelompok rentan, seperti anak-anak, lansia, serta masyarakat dengan penyakit tertentu, agar meminimalkan kegiatan di luar ruangan. Secara historis, kewaspadaan terhadap Krakatau memiliki alasan kuat: erupsi besar 1883 menewaskan lebih dari 36.000 orang, terutama akibat tsunami, dan dampaknya tercatat hingga berbagai wilayah dunia. USGS menyebut material letusan saat itu bahkan mencapai lapisan stratosfer dan kolom erupsi menjulang lebih dari 30 kilometer.

Anak Krakatau sendiri terbentuk di dalam kaldera bekas Krakatau setelah letusan 1883 dan mulai mengalami aktivitas erupsi berulang sejak 1927. Pada 2018, aktivitasnya kembali menjadi perhatian dunia setelah keruntuhan tubuh gunung memicu tsunami di Selat Sunda. Kemenkes kini melanjutkan pemantauan kualitas udara dan dampak kesehatan untuk memastikan risiko akibat erupsi dapat diantisipasi, terutama bagi masyarakat yang berada di wilayah dengan konsentrasi partikulat tinggi.(*)

Kemenkes Kirim 160 Nakes TCK Batch 2, Fokus Pulihkan Trauma Korban Gempa NTT

JAKARTA, BP- Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI kembali memperkuat layanan kesehatan bagi masyarakat terdampak gempa bumi di Nusa Tenggara Timur (NTT) dengan mengirimkan 160 Tenaga Cadangan Kesehatan (TCK) Batch 2. Penugasan kali ini lebih diarahkan pada pemulihan psikososial dan kesehatan mental masyarakat, terutama anak-anak dan warga yang mengalami trauma akibat bencana.

Sebanyak 160 tenaga kesehatan tersebut diberangkatkan dari Terminal 2 Bandara Soekarno-Hatta, Senin (7/9/2026), untuk ditempatkan di empat kabupaten di wilayah Flores, yakni Ngada, Manggarai, Manggarai Barat, dan Manggarai Timur.

Pelaksana Tugas Kepala Pusat Krisis Kesehatan Kemenkes, Sumarjaya, mengatakan pola penugasan Batch 2 berbeda dengan tahap sebelumnya karena kebutuhan layanan psikososial mulai menjadi perhatian penting dalam masa pemulihan. “Pendekatannya agak berbeda karena ini lebih kepada psikososial, bagaimana kita memberangkatkan tenaga-tenaga yang memberikan kesehatan mental bagi masyarakat di daerah Flores,” ujar Sumarjaya.

Pengiriman tersebut merupakan kelanjutan dari dukungan Kemenkes pada tahap pertama. Sebelumnya, sebanyak 206 tenaga kesehatan telah diberangkatkan untuk membantu pelayanan kesehatan masyarakat yang terdampak gempa di NTT.

Dalam penugasan tahap kedua, para TCK akan memberikan pelayanan di sejumlah fasilitas kesehatan, termasuk puskesmas dan rumah sakit lapangan. Saat ini terdapat dua rumah sakit lapangan yang mendukung pelayanan bagi korban gempa, masing-masing berada di Ruteng dan Ngada.

Menurut Sumarjaya, dampak bencana tidak berhenti pada cedera fisik seperti patah tulang dan luka. Kehilangan harta benda serta pengalaman menghadapi bencana juga dapat memengaruhi kondisi psikologis masyarakat. Karena itu, tenaga kesehatan turut memberikan edukasi dan komunikasi untuk membantu masyarakat melewati masa pemulihan. “Untuk saat ini, itu adalah lebih kepada psikososial, bagaimana memberikan edukasi, komunikasi kepada

da masyarakat terdampak,” katanya.

Dokter umum TCK, dr. Shaldy Syifa Azzahri, mengatakan kesia-paan tenaga kesehatan tidak hanya mencakup peralatan dan bahan kesehatan, tetapi juga kondisi fisik serta mental personel sebelum menjalankan tugas. “Sebagai seorang dokter, kita menyiapkan beberapa alat-alat dan juga bahan yang bisa kita bantu untuk memperbaiki dan juga memulihkan kesehatan masyarakat,” ujarnya.

Shaldy menambahkan, pelayanan pascagempa perlu memperhatikan kesehatan psikologis seiring berjalannya waktu setelah bencana. “Ini bukan lagi hanya memperbaiki kesehatan dari fisiknya saja, tapi juga kita harus membantu untuk memulihkan kesehatan psikologisnya juga. Jadi di sini kita membantu sama-sama untuk bisa menjadi bagian dari proses pemulihan mereka,” katanya.

Dokter umum TCK asal Padang, dr. Rayhendra Hanif, juga mengaku mempersiapkan kondisi mental dan kebutuhan pribadi, termasuk obat-obatan, sebelum berangkat. Pengalamannya menghadapi gempa Padang pada 2009 saat masih duduk di sekolah dasar menjadi salah satu alasan dirinya tergerak membantu korban di NTT. “Saya dulu dari Padang tahun 2009 itu juga sudah pernah gempa. Jadi hati saya juga tergerak untuk pergi ke NTT karena kondisinya mirip, sama-sama gempa,” ungkap Rayhendra.

Penugasan TCK dilakukan mengikuti standar Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), dengan masa tugas selama 14 hari sebelum dilakukan pergantian personel. Penempatan tenaga kesehatan disesuaikan dengan masa tanggap darurat yang ditetapkan Pemerintah Provinsi NTT hingga 12 September 2026 dan dapat diperpanjang berdasarkan kebutuhan di lapangan.

Selain memberikan layanan psikososial, TCK turut membantu perawatan pasien pascaoperasi. Kemenkes sebelumnya juga telah mengerahkan dokter spesialis, termasuk spesialis ortopedi dan bedah, untuk menangani pasien yang membutuhkan tindakan operasi. Di sisi lain, surveilans kesehatan terus diperkuat untuk mengidentifikasi potensi penyakit menular dan mencegah terjadinya Kejadian Luar Biasa (KLB) maupun wabah pascabencana. “Tim kita surveillance juga kita turunkan untuk melihat, mengidentifikasi penyakit-penyakit apa yang terjadi di sana supaya tidak terjadi potensi KLB dan wabah,” tandas Sumarjaya(Andina L)

PT FAREN GRAFIKA KRITIK, LUGAS, DAN INDEPENDEN Wartawan Baubau Post tidak menerima imbalan dalam bentuk apapun dalam melakukan tugas jurnalistik Dalam Pelaksanaan Tugas, Wartawan Baubau Post dibekali tanda pengenal. Untuk itu, masyarakat yang mencurigai seseorang yang mengatasnamakan Baubau Post, segera menghubungi Kantor Redaksi Surat Kabar Baubau Post Segala berita yang diterbitkan oleh Baubau Post meruoakan tanggung jawab penanggungjawab redaksi	Pemimpin Umum: Fauzan NWA Penanggungjawab/Pemimpin Redaksi: Ardi Redpel: Prasetyo Korlip: Firman Redaktur: Kasrun,Rahim Reporter: Mashuri, Lisna, Asis, Hafid, Amat Jr, Noval, La Harman	Layouter: Ririn Pracetak: Aditya Cetak Jamaludin	Penerbit: PT FAREN GRAFIKA Komisaris: Erna Agule Direktur Utama: Andina Latief Manager Keuangan: Nabila DAA Manager Iklan & Pemasaran: Jamaluddin Kepala Sirkulasi: Robi Administrasi: Salvana	Kepala Biro Wakatobi: Risman Kepala Biro Buton Utara: Kasrun Kepala Biro Buton: La Harman Kepala Biro Buton Selatan: Firman Kepala Biro Buton Tengah: Komarudin Kepala Biro Sultra: Masuri Agen Baubau: Jamaluddin Agen Buton Selatan: Firman Agen Buton: Samrihan Agen Buton Utara: Kasrun Harga dan Langganan: Dalam Kota Baubau 100.000/bulan, Luar Kota Baubau + Ongkos Kirim Eceran dalam Kota Baubau Rp 5000/eks
Alamat Redaksi/Tata usaha: Jalan Raya Palagimata (BTN Lipu Morikana) Blok K Nomor 01 Kelurahan Lipu, Kecamatan Betoambari, Kota Baubau, Provinsi Sulawesi Tenggara Tlp 0402-2014287- Email: baubaupost2019@gmail.com, ardiandina7786@gmail.com Percetakan: PT Faren Grafika, Alamat:Jalan Raya Palagimata (BTN Lipu Morikana) Blok K Nomor 01 Kelurahan Lipu, Kecamatan Betoambari, Kota Baubau, Provinsi Sulawesi Tenggara				

Tim 9 Sita Rp5 Miliar dari Ferry Boboho, Kasus Febrie Terus Didalami



Kejaksaan Agung menyita Rp5 miliar dari Ferry Hongkiriwang terkait kasus pemerasan dan pencucian uang yang melibatkan eks Jampidsus Febrie Adriansyah.

Laporan: Amran

JAKARTA, BP- Penyidikan dugaan pemerasan dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang menyeret mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah memasuki babak baru. Tim 9 Kejaksaan Agung (Kejagung) telah menyita uang sekitar Rp5 miliar yang diserahkan pengusaha Ferry Hongkiriwang alias Ferry Boboho.

Penyitaan uang tersebut menjadi salah satu barang bukti yang tengah didalami penyidik untuk mengurai dugaan tindak pidana asal dalam perkara tersebut. Uang itu diserahkan langsung oleh Ferry kepada penyidik Tim 9 sekitar satu bulan sebelum informasi penyitaan tersebut disampaikan ke publik.

Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Anang Supriatna membenarkan penyitaan tersebut. "Benar (penyitaan), sekitar Rp5 miliar," kata Anang saat dihubungi, Jumat (11/9).

Menurut Anang, penyerahan uang oleh Ferry dilakukan sekitar sebulan lalu. "Sekitar sebulan yang lalu," ujarnya. Meski demikian, Kejagung belum merinci secara terbuka bagaimana konstruksi aliran uang tersebut serta posisi Ferry dalam rangkaian perkara yang sedang ditelusuri Tim 9.

Penyidikan itu berkaitan dengan dugaan pemerasan dalam penanganan perkara PT Jiwasraya dan Asabri. Kejagung sebelumnya menyatakan telah menemukan bukti yang dinilai cukup untuk

mendalami dugaan pemerasan dalam proses penanganan perkara tersebut.

Salah satu nama yang disebut dalam pengembangan penyidikan adalah pengusaha properti Tan Kian. Tim 9 Kejagung telah memeriksa Tan Kian untuk mendalami dugaan TPPU yang dikaitkan dengan perkara Febrie.

Anang sebelumnya mengatakan pemeriksaan dan pendalaman yang dilakukan Tim 9 menemukan indikasi adanya tindak pidana pemerasan dalam penanganan perkara Jiwasraya. "Didalami sudah dan ditemukan cukup bukti menurut Tim 9 adanya tindak pidana pemerasan dalam penanganan perkara Jiwasraya yang melibatkan di situ salah satunya kalau tidak salah Tan Kian," kata Anang, Kamis (10/9).

Selain menelusuri pihak-pihak yang diduga berkaitan dengan perkara, penyidik juga berupaya mengamankan barang bukti yang dapat menjelaskan tindak pidana asal. Kejagung memastikan sebagian uang yang diduga berkaitan dengan perkara tersebut telah disita oleh Tim 9.

"Ada sebagian daripada barang bukti yang sudah dilakukan penyitaan berupa uang oleh Tim 9," tutur Anang.

Keterangan tersebut menunjukkan bahwa penyidikan tidak hanya diarahkan pada dugaan pemerasan, tetapi juga pada kemungkinan pencucian hasil tindak pidana. Dalam perkara TPPU, penelusuran aset dan aliran dana menjadi penting untuk meng-

etahui sumber, perpindahan, serta hubungan antara uang yang disita dengan dugaan tindak pidana asal.

Secara historis, perkara yang berkaitan dengan Jiwasraya dan Asabri merupakan dua kasus besar yang pernah ditangani aparat penegak hukum Indonesia. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada Maret 2020 menyatakan kerugian negara dalam perkara Jiwasraya mencapai Rp16,81 triliun berdasarkan pemeriksaan atas pengelolaan keuangan dan dana investasi periode 2008-2018.

Setahun kemudian, BPK menyatakan terdapat kerugian negara Rp22,78 triliun dalam pengelolaan keuangan dan dana investasi PT Asabri selama 2012-2019. Laporan pemeriksaan investigatif tersebut diserahkan kepada Kejagung pada 27 Mei 2021.

Besarnya nilai perkara Jiwasraya dan Asabri membuat proses penelusuran aset menjadi bagian penting dalam pemberantasan korupsi dan kejahatan keuangan. Dalam konteks Jiwasraya, BPK sebelumnya juga mencatat bahwa pemeriksaan investigatif menemukan penyimpangan yang berindikasi fraud dalam pengelolaan produk Saving Plan dan investasi.

Secara internasional, pemberantasan pencucian uang telah berkembang menjadi agenda lintas negara. Financial Action Task Force (FATF) dibentuk pada 1989 oleh negara-negara G7 untuk mengembangkan langkah menghadapi pencucian uang dan pada

1990 menerbitkan 40 rekomendasi sebagai kerangka internasional. Mandat FATF kemudian berkembang mencakup pendanaan terorisme dan pendanaan proliferasi.

Pembangunan tersebut memperlihatkan bahwa penanganan TPPU tidak berhenti pada pembuktian tindak pidana awal, tetapi juga menasar aset dan sistem keuangan yang diduga digunakan untuk menyamarkan hasil kejahatan. FATF saat ini menetapkan standar global yang menjadi acuan negara-negara dalam mencegah dan menindak pencucian uang serta kejahatan keuangan lainnya.

Dalam perkara Febrie, penyitaan sekitar Rp5 miliar dari Ferry Boboho kini menjadi bagian dari rangkaian pembuktian yang sedang dikembangkan Tim 9. Penyidik masih harus menguji keterkaitan uang tersebut dengan dugaan tindak pidana asal, termasuk dugaan pemerasan dalam penanganan perkara Jiwasraya, serta menelusuri kemungkinan aliran dana kepada pihak lain.

Kejagung belum mengungkap secara terperinci seluruh hasil penyidikan maupun konstruksi perkara secara keseluruhan. Dengan demikian, penyitaan uang tersebut menjadi salah satu fakta dalam proses hukum yang masih berjalan dan belum dapat disimpulkan akhir mengenai keterlibatan setiap pihak yang diperiksa. (*)

Tiga ASN Dinas Pertanian Jayawijaya Tewas Ditembak KKB, Polisi Kantongi Identitas Pelaku



JAKARTA, BP- Tiga pegawai Dinas Pertanian Kabupaten Jayawijaya, Papua Pegunungan, tewas ditembak kelompok kriminal bersenjata (KKB) di wilayah Muliama, Rabu (9/9) sekitar pukul 15.53 WIT. Polisi kini memburu para pelaku yang diduga berjumlah sekitar delapan orang.

Korban masing-masing berinisial WM (24), AR (49), dan AAM (35). Ketiganya merupakan bagian dari rombongan Dinas Pertanian Jayawijaya yang sedang menjalankan kegiatan pelayanan dan pendampingan masyarakat sebelum diserang dalam perjalanan kembali menuju Wame-na.

Kasatgas Humas Operasi Damai Cartenz 2026, Kombes Yusuf Sutejo, mengatakan rombongan tersebut sebelumnya hendak memberikan bantuan ternak berupa anak babi, melakukan pengecekan lahan cetak sawah, serta memberikan penyuluhan terkait peternakan.

Dalam perjalanan pulang, kendaraan yang ditumpangi rombongan diduga dihentikan kelompok bersenjata. Para pelaku kemudian meminta ketiga korban turun dari kendaraan dan menggiring mereka ke bagian belakang kendaraan.

Tidak lama berselang, terdengar tiga kali letusan senjata api. Setelah menembak para korban, kelompok tersebut melarikan diri dari lokasi kejadian. Ketiga korban mengalami luka tembak dan meninggal dunia.

WM mengalami luka tembak di bagian pinggang kanan. Sementara AR yang menjabat Kepala Bidang Peternakan Dinas Pertanian Jayawijaya mengalami luka tembak di bagian perut dan meninggal dunia di lokasi. Adapun AAM mengalami luka tembak pada bagian belakang kepala dan tangan kiri serta juga meninggal di tempat.

Polisi kemudian melakukan olah tempat kejadian perkara dan menemukan sejumlah barang bukti. Yusuf mengatakan petugas menemukan tiga selongsong peluru, terdiri atas dua selongsong berkaliber 5,56 milimeter yang diduga berasal dari senjata api laras panjang dan satu selongsong berkaliber 9 milimeter yang diduga berasal dari senjata api laras pendek.

Selain selongsong peluru, petugas menemukan jejak darah di sekitar lokasi. Berdasarkan keterangan awal saksi yang selamat, kelompok penyerang diperkirakan berjumlah sekitar delapan orang dan membawa dua pucuk senjata api laras panjang. Polisi masih mendalami kemungkinan adanya senjata api laras pendek.

Penyelidikan juga mengungkap bahwa para pelaku sempat mengambil telepon seluler milik salah satu korban, WM, kemudian melakukan

video call dengan keluarga korban. Rekaman percakapan tersebut selanjutnya beredar di media sosial.

Kepala Operasi Damai Cartenz 2026, Irjen Faizal Ramadhani, membenarkan adanya video call tersebut. Yusuf mengatakan komunikasi dalam video menggunakan bahasa Papua sehingga masih diperlukan penerjemahan untuk mengetahui isi pembicaraan secara lebih lengkap.

Dari rekaman video tersebut, polisi kemudian mengidentifikasi dua orang yang terlihat di dalamnya, yakni PN dan KT. Setelah mencocokkan ciri-ciri dalam rekaman dengan data kepolisian, keduanya dipastikan merupakan anggota KKB yang masuk dalam daftar pencarian orang (DPO).

PN dan KT diduga merupakan anggota kelompok KKB Kodap III Ndugama pimpinan Egianus Kogoya. Polisi juga menduga keduanya terkait dengan sejumlah kasus kekerasan di Papua, termasuk penembakan saat Festival Budaya Lembah Baliem di Kabupaten Jayawijaya pada 8 Agustus 2026 yang menyebabkan dua warga sipil terluka.

Keduanya juga diduga terlibat dalam kasus penyanderaan pilot Susi Air, Kapten Philip Mark Mehrrens, di Kabupaten Nduga pada 7 Februari 2023. Pilot tersebut kemudian berhasil dibebaskan pada 21 September 2024.

"Setelah kami sandingkan dengan data yang kami miliki serta ciri-ciri yang ada pada kami, kami memastikan dua orang tersebut merupakan PN dan KT yang masuk dalam DPO kami," kata Yusuf dalam keterangan tertulis, Jumat (11/9).

Yusuf mengatakan polisi telah memeriksa sejumlah saksi, termasuk saksi yang selamat, untuk mengungkap identitas dan keberadaan para pelaku. Tim Operasi Damai Cartenz juga terus melakukan pengejaran terhadap PN, KT, dan pihak lain yang diduga terlibat dalam penembakan tersebut.

Sebagai bagian dari langkah pengamanan, Satgas Kepolisian Operasi Damai Cartenz 2026 melakukan penebalan personel di Wamena, Kabupaten Jayawijaya. Penambahan kekuatan itu ditujukan untuk menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat sekaligus mendukung proses pencarian para pelaku.

Sementara itu, tiga jenazah korban telah dipulangkan ke kampung halaman masing-masing. Polisi memastikan penyelidikan dan pengejaran terhadap kelompok bersenjata yang bertanggung jawab atas serangan tersebut masih berlangsung. (Alwan)

Kepala BKPSDM Busel Haida Tegaskan BKPSDM Buton Selatan Akan Evaluasi Disiplin ASN Lewat Monitoring Tanpa Pemberitahuan, Ini Sesuai Perintah Bupati Busel H Muh Adios

dan daya beli masyarakat, kata Adios. (*) dan daya beli masyarakat, kata Adios. (*) dan daya beli masyarakat, kata Adios. (*) dan daya beli masyarakat, kata Adios. (*)

DPRD Buteng Sahkan Perubahan APBD 2026, Infrastruktur Jadi Prioritas, 19 Ribu Rumah Tangga Dapat Bantuan

daerah antara lain mengamankan Rp35 miliar untuk pembangunan talut serta akses jalan lingkaran Lakudo-Gonggoma, sementara program percontohan Transmigrasi Maritim memperoleh dukungan Rp17 miliar.

Dukungan pemerintah pusat juga masuk melalui program Inpres Jalan Daerah (IJD). Jalan Mawasangka-Batas Muna mendapat alokasi Rp27 miliar, sedangkan jalan Sekolah Rakyat dan jalan Lowu-Lowu masing-masing mendapat Rp16 miliar. Pemerintah daerah juga menyiapkan lahan dan akses menuju Sekolah Nasional Terintegrasi dengan target anggaran fisik hingga Rp200 miliar.

“Masukan konstruktif dari fraksi-fraksi DPRD sangat membantu penyempurnaan anggaran perubahan agar lebih efektif,” kata Azhari. Menurut dia, penguatan sinergi eksekutif dan legislatif juga penting untuk membuka ruang masuknya dukungan anggaran dari

pemerintah pusat.

Pada sektor kesehatan, Pemkab Buton Tengah menyiapkan pembangunan Laboratorium Kesehatan Daerah (Labkesda). Saat ini, pemerintah daerah masih memproses penyiapan sertifikat tanah sebagai bagian dari tahapan pembangunan fasilitas tersebut.

Kebijakan perubahan APBD juga menyentuh perlindungan sosial. Pemkab Buton Tengah menyalurkan bantuan sembako kepada 19.000 rumah tangga serta memperluas penerima Kartu Keluarga Sejahtera dan Program Keluarga Harapan (PKH), khususnya masyarakat yang belum terjangkau bantuan dari pemerintah pusat. “Kami ingin bantuan tepat sasaran kepada masyarakat yang memang belum ter-cover program pusat,” ujar Azhari.

Dalam sejarah pengelo-

laan keuangan daerah di Indonesia, perubahan APBD merupakan instrumen untuk menyesuaikan kebijakan fiskal dengan perkembangan kondisi dan kebutuhan daerah dalam satu tahun anggaran. Praktik penganggaran publik serupa juga berkembang secara global setelah desentralisasi fiskal menjadi bagian penting dalam tata kelola pemerintahan modern, terutama untuk memastikan belanja publik dapat merespons perubahan kebutuhan masyarakat.

Azhari meminta kondisi keamanan dan ketertiban di Buton Tengah tetap terjaga agar pelaksanaan proyek strategis serta agenda kunjungan pemerintah pusat berlangsung lancar. “Sinergi pemerintah daerah dan DPRD harus terus dipertahankan agar kebijakan anggaran benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat,” ujarnya. (*)

Reses Anggota DPRD Baubau H Masri Ungkap Jembatan Pulau Makassar Keropos, Pemprov Diminta Turun

mendorong warga membuang sampah ke laut. “Yang urgen tadi adalah pengangkutan sampah dari Pulau Makassar ke kawasan Lowu-Lowu. Mungkin diperlukan kendaraan kecil atau kendaraan pengangkut sampah yang bisa mengangkut sampah masyarakat secara rutin,” kata Masri.

Untuk persoalan jembatan, laporan awal disampaikan warga bernama Aswan. Masri kemudian berkoordinasi dengan pihak kecamatan dan meminta dokumentasi kondisi fisik jembatan. Setelah menerima foto, ia meneruskan informasi tersebut kepada Pemerintah Kota Baubau. “Ketika saya dilaporkan oleh warga, pertama teman saya Pak Aswan yang menyampaikan tentang kondisi jembatan Pulau Makassar yang mengalami keropos. Saya kemudian berkomunikasi dengan Pak Camat dan meminta agar kondisi jembatan difoto,” ujarnya.

Pemkot Baubau selanjutnya telah menyurati Gubernur Sulawesi Tenggara dan DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara untuk meminta dukungan penanganan. Masri menyebut DPRD Kota Baubau juga akan terus melakukan koordinasi agar perbaikan dapat dipercepat. “Pak Wali juga sudah membuat surat kepada Gubernur dan DPRD Provinsi. Kami di DPRD Kota juga akan terus mendorong dan berkoordinasi agar penanganan jembatan ini bisa dilakukan sesingkat mungkin karena kondisinya sudah membahayakan masyarakat,” katanya.

Dorongan tersebut sejalan dengan

gan prinsip bahwa jembatan bukan sekadar bangunan penghubung, melainkan bagian penting dari keselamatan dan konektivitas masyarakat. Dalam sejarah pembangunan infrastruktur Indonesia, Jembatan Suramadu menjadi salah satu contoh bagaimana konektivitas antarpulau ditempatkan sebagai instrumen pemerataan. Jembatan sepanjang sekitar 5,4 kilometer itu diresmikan pada 10 Juni 2009 setelah pembangunan kembali dimulai pada 2003. Pemerintah juga menekankan bahwa umur layanan jembatan sangat bergantung pada pemeliharaan rutin dan rehabilitasi yang baik.

Masri mengatakan, karena jembatan Pulau Makassar berkaitan dengan kewenangan provinsi, dukungan DPRD dan Pemprov Sulawesi Tenggara diperlukan agar penanganannya tidak berlarut. Ia menyebut telah berkomunikasi dengan DPRD Provinsi dan memperoleh komitmen untuk ikut mengawal persoalan tersebut. “Yang jelas karena ini kewenangan provinsi, kita masih meminta dukungan dari provinsi. Alhamdulillah, kami sudah berkomunikasi dengan DPRD Provinsi dan mereka menyatakan akan mengawal,” ucapnya.

Seluruh aspirasi, kata Masri, akan menjadi bahan perjuangan DPRD Kota Baubau, terutama yang menyangkut keselamatan, pelayanan dasar, dan kebutuhan sehari-hari. Ia berharap DPRD Kota Baubau, Pemkot Baubau, DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara, dan Pemprov Sulawesi Tenggara dapat memperkuat koordinasi, termasuk memastikan TPS serta jadwal pengangkutan sampah berjalan rutin. “Intinya kita harus saling bahu-membahu,” ujarnya. (*)

Bupati Buton Alvin Akawijaya Dorong Desa Winning dan Mantowu Siapkan Adaptasi Iklim

Buton Alvin Akawijaya Putra.

Lokakarya tersebut menjadi tahap lanjutan setelah masyarakat Desa Winning dan Desa Mantowu bersama Yayasan Bina Potensi Desa menyusun Rencana Adaptasi Perubahan Iklim Berbasis Komunitas. Penyusunan rencana dilakukan dengan melibatkan warga untuk mengenali tantangan, potensi dampak, serta kebutuhan adaptasi yang muncul di tingkat desa.

Bupati Alvin mengatakan keterlibatan masyarakat menjadi faktor penting karena warga merupakan pihak yang berhadapan langsung dengan perubahan kondisi lingkungan di wilayah masing-masing. Karena itu, pemerintah tidak dapat menempatkan masyarakat sekadar sebagai penerima manfaat program.

“Perubahan iklim ini bukan persoalan yang hanya bisa kita selesaikan oleh pemerintah. Masyarakat harus terlibat sejak perencanaan, karena masyarakat yang paling memahami kondisi dan kebutuhan di wilayahnya,” ujar Alvin.

Menurut dia, hasil lokakarya harus bergerak dari dokumen perencanaan menuju tindakan nyata. Program adaptasi yang disusun bersama diharapkan dapat menjadi dasar bagi pemerintah dan masyarakat dalam menentukan langkah yang sesuai dengan risiko iklim serta potensi lokal.

“Yang paling penting adalah bagaimana rencana ini bisa kita

implementasikan. Apa yang sudah dirumuskan bersama harus menjadi dasar untuk mengambil langkah konkret agar masyarakat semakin siap menghadapi perubahan iklim,” katanya.

Upaya tersebut sejalan dengan perkembangan agenda adaptasi perubahan iklim secara global. Isu perubahan iklim menjadi perhatian internasional sejak pembentukan UNFCCC pada 1992 dan semakin menguat melalui Perjanjian Paris 2015. Di Indonesia, agenda adaptasi juga diarahkan untuk memperkuat ketahanan masyarakat dan pembangunan berkelanjutan. Dalam konteks Buton, pendekatan berbasis komunitas di Desa Winning dan Desa Mantowu diharapkan menghasilkan langkah yang lebih terarah dalam menghadapi risiko iklim sekaligus mengoptimalkan potensi setempat.

Pemkab Buton selanjutnya berkomitmen melanjutkan berbagai inisiatif peningkatan kapasitas masyarakat, dengan memperkuat kerja sama antara pemerintah, warga, lembaga pendukung, dan pemangku kepentingan lainnya. Dengan demikian, rencana adaptasi yang telah disusun tidak berhenti sebagai dokumen, tetapi dapat diterjemahkan menjadi program yang memberikan manfaat nyata bagi ketahanan masyarakat desa. (*)

Kolaborasi BPBD-Basarnas Baubau Latih LPM Batupoaro dan Betoambari Hadapi Risiko Bencana di Wilayah Pesisir



berlangsung pada 9-10 September 2026 itu dipusatkan di Kantor Basarnas Baubau dan Pantai Daeng Lala. Kegiatan dibuka Plt. Kepala Pelaksana BPBD Kota Baubau, Dr. Mohamad Tasdik, M.Si., dengan personel Basarnas Baubau bertindak sebagai instruktur dalam pembekalan teori maupun praktik lapangan.

Tasdik mengatakan pelibatan masyarakat dalam kesiapsiagaan menjadi penting karena warga di sekitar lokasi kejadian berpotensi tiba lebih dahulu dibandingkan petugas penyelamat. Karena itu, kemampuan dasar melakukan pertolongan perlu dimiliki masyarakat tanpa mengabaikan batas kemampuan penolong.

“Yang lebih dulu tiba di lokasi kejadian bukan petugas, melainkan warga di sekitarnya. Karena itu kemampuan dasar menolong harus ada di tangan masyarakat,” ujar Tasdik dalam siaran pers, Jumat (11/9/2026).

Pada hari pertama, peserta mempelajari pengenalan peralatan, prosedur keselamatan, dan pertolongan awal. Materi tersebut kemudian diterapkan pada hari kedua melalui praktik di Pantai Daeng Lala, termasuk penggunaan peralatan keselamatan dan

penanganan kecelakaan di laut. Peserta juga mendapat penjelasan mengenai penggunaan alat secara tepat serta batas kemampuan penolong dari personel Basarnas.

Pemilihan Batupoaro dan Betoambari sebagai sasaran awal berkaitan dengan karakter kedua wilayah yang memiliki kawasan pesisir dan aktivitas masyarakat di laut cukup tinggi. “Pelatihan ini merupakan tindak lanjut koordinasi BPBD dan Basarnas untuk memperkuat kesiapsiagaan menghadapi potensi kecelakaan dan bencana di wilayah pesisir,” kata Tasdik.

Penguatan kapasitas masyarakat tersebut sejalan dengan perubahan paradigma penanggulangan bencana di Indonesia setelah gempa dan tsunami Aceh 2004. Pemerintah kemudian memperkuat kerangka hukum melalui UU Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana yang menempatkan penanggulangan bencana sebagai rangkaian kegiatan sejak sebelum, saat, hingga setelah

bencana. BNPB mencatat Indonesia mengalami 3.472 kejadian bencana sepanjang 2024, dengan banjir, kebakaran hutan dan lahan, serta cuaca ekstrem sebagai kejadian dominan.

Dalam konteks global, penguatan kesiapsiagaan berbasis masyarakat juga menjadi bagian dari upaya pengurangan risiko bencana. Perserikatan Bangsa-Bangsa menetapkan 13 Oktober sebagai Hari Internasional Pengurangan Risiko Bencana sejak 1989 untuk mendorong budaya sadar risiko di tingkat masyarakat. BPBD Baubau selanjutnya akan mengembangkan pelatihan serupa secara bertahap ke kecamatan lain dan memperkuat keberadaan relawan kebencanaan hingga tingkat kelurahan. Langkah ini juga melanjutkan tradisi penguatan kapasitas SAR di Indonesia yang telah berkembang sejak pembentukan Badan SAR Indonesia pada 1972 dan kemudian berkembang menjadi Basarnas. (*)

Apel Besar Pramuka ke-65, Wali Kota Baubau H Yusran Fahim Tekankan Generasi Muda Berkarakter



Laporan: Prasetyo M

BAUBAU, BP- Wali Kota Baubau H. Yusran Fahim, S.E. meminta Gerakan Pramuka tidak berhenti pada pembentukan keterampilan dasar kepanduan, tetapi berkembang menjadi wadah yang melahirkan generasi kreatif, inovatif, mandiri, dan mampu menghadapi perubahan teknologi. Pesan itu disampaikan saat membuka Apel Besar Gerakan Pramuka ke-65 sekaligus Perkemahan Budaya Kwartir Cabang Gerakan Pramuka Kota Baubau 2026 di Baubau, Jumat (11/9/2026).

Yusran menilai tantangan generasi muda saat ini semakin kompleks. Kemajuan teknologi digital, menurut dia, harus diimbangi dengan kemampuan memilah informasi dan kebijaksanaan dalam menggunakannya. Perundungan, kekerasan, penyalahgunaan narkoba, perjudian daring, kecanduan gawai, serta paparan konten negatif menjadi sejumlah persoalan yang perlu diantisipasi melalui pembinaan generasi muda.

Karena itu, ia

mendorong anggota Pramuka agar tidak sekadar menjadi konsumen perkembangan teknologi. Generasi muda Baubau diharapkan mampu menghasilkan gagasan, karya, dan inovasi yang memberikan manfaat bagi masyarakat.

“Jangan menjadi generasi yang hanya pintar menggunakan teknologi. Jadilah generasi yang bijaksana menggunakan teknologi. Jangan hanya menjadi pengguna, jadilah pencipta. Dan jangan hanya menjadi penonton, jadilah pelaku perubahan,” kata Yusran.

Pesan tersebut juga dikaitkan Yusran dengan posisi Pramuka sebagai bagian dari proses menyiapkan calon pemimpin daerah. Di hadapan peserta apel, ia mengatakan Baubau memiliki sejarah panjang dalam peradaban Buton sehingga generasi muda yang tumbuh di kota itu memiliki tanggung jawab untuk meneruskan pembangunan sekaligus menjaga identitas daerah.

“Di antara kalian yang berdiri di lapangan ini, kelak akan ada yang memimpin Kota Baubau,” ujarnya.

Perkemahan Budaya 2026, lanjut Yus-

ran, menjadi salah satu cara mempertemukan generasi muda dengan sejarah, adat dan kebudayaan daerah. Kegiatan tersebut diharapkan tidak hanya menjadi aktivitas perkemahan, tetapi ruang belajar yang menghubungkan nilai masa lalu dengan kreativitas generasi masa kini dan perkembangan teknologi.

“Kita tidak boleh hanya bangga kepada peninggalan leluhur. Kita harus mampu meneruskan nilai-nilai baik yang diwariskan leluhur,” ungkapnya.

Secara historis, Gerakan Pramuka Indonesia resmi diperkenalkan kepada masyarakat pada 14 Agustus 1961. Sebelumnya, proses pembentukannya ditandai Keputusan Presiden Nomor 238 Tahun 1961 pada 20 Mei 1961 dan peleburan berbagai organisasi kepanduan ke dalam satu wadah. Pada 14 Agustus 1961, Presiden Soekarno menyerahkan Panji Gerakan Pendidikan Kepanduan Nasional Indonesia kepada Sri Sultan Hamengku Buwono IX. Tanggal tersebut kemudian diperingati sebagai Hari Pramuka.

Gerakan kepanduan sendiri memiliki se-

jarah lebih panjang di tingkat global. World Organization of the Scout Movement mencatat kegiatan perkemahan eksperimental Robert Baden-Powell bersama 20 anak laki-laki di Brownsea Island, Inggris, pada 1907 sebagai salah satu tonggak kelahiran gerakan kepanduan dunia. Gerakan tersebut kemudian berkembang menjadi gerakan pendidikan kepemudaan yang kini mencakup lebih dari 200 negara dan teritori.

Dalam konteks Baubau, Yusran berharap nilai yang ditanamkan melalui Gerakan Pramuka tetap berakar pada Tri Satya dan Dasa Dharma, sekaligus relevan dengan kebutuhan generasi digital. Ia juga menyampaikan penghargaan kepada para pembina, pelatih, orang tua, sekolah, masyarakat, dan seluruh pihak yang mendukung pembinaan Pramuka di Kota Baubau.

Menutup amanatnya, Yusran berpesan agar seluruh peserta menjaga kondisi selama mengikuti rangkaian kegiatan. “Jaga kesehatan, jaga keamanan, jaga kebersihan, jaga persaudaraan, dan jadilah Pramuka yang memberikan manfaat,” pungkasnya. (*)

Dari Usulan Musrenbang, Waruruma Bekali Warga Keterampilan Menyablon



Laporan: Prasetyo M

BAUBAU, BP- Pemerintah Kelurahan Waruruma, Kecamatan Kokalukuna, Kota Baubau, mengarahkan program pemberdayaan masyarakat pada penguatan keterampilan yang berpotensi menghasilkan pendapatan. Salah satunya melalui pelatihan penyablonan yang digelar Rabu (9/9/2026) dengan menghadirkan pelatih berpengalaman di bidang tersebut.

Kegiatan itu diharapkan tidak berhenti sebagai pelatihan teknis. Pemerintah Kelurahan Waruruma menargetkan keterampilan menyablon dapat dikembangkan warga menjadi usaha produktif, baik secara individu maupun kelompok, sekaligus membuka peluang ekonomi baru di tingkat kelurahan.

Lurah Waruruma, Eko S.IP., mengatakan pemilihan pelatihan sablon merupakan bagian dari respons pemerintah terhadap kebutuhan masyarakat. Program tersebut berasal dari usulan warga yang disampaikan melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang).

“Alhamdulillah, pada hari ini kami dari Pemerintah Kelurahan Waruruma melaksanakan pelatihan sablon. Kegiatan ini merupakan salah satu usulan masyarakat

melalui Musrenbang, khususnya dalam rangka pemberdayaan dan peningkatan ekonomi masyarakat,” ujar Eko.

Menurut dia, keterampilan tersebut dapat menjadi bekal bagi masyarakat untuk menghasilkan produk bernilai ekonomi. Warga tidak hanya memperoleh pengetahuan mengenai teknik penyablonan, tetapi juga didorong untuk melihatnya sebagai peluang usaha yang dapat dikembangkan secara mandiri.

“Kami berharap pelatihan sablon ini bisa meningkatkan salah satu usaha yang ada di masyarakat Kelurahan Waruruma. Mudah-mudahan keterampilan yang diperoleh dapat dikembangkan dan memberikan manfaat secara ekonomi bagi warga,” katanya.

Untuk mendukung pencapaian tujuan itu, Pemerintah Kelurahan Waruruma menggunakan anggaran kelurahan untuk membiayai kegiatan pemberdayaan masyarakat tersebut. Pelatih yang memiliki pemaparan dan pengalaman di bidang penyablonan juga dihadirkan agar peserta memperoleh materi sekaligus pengalaman praktik.

“Kami mengusahkan pelatih yang memang mema-

hami kegiatan ini dan sudah berpengalaman, sehingga masyarakat setidaknya bisa memahami sedikit banyak bagaimana proses penyablonan,” jelas Eko.

Pelatihan keterampilan seperti sablon memiliki kaitan dengan perkembangan ekonomi kreatif yang semakin luas. Di Indonesia, aktivitas ekonomi berbasis kreativitas berkembang dari usaha rumahan dan kerajinan hingga sektor fesyen, desain, dan produk promosi. Secara global, teknik cetak saring atau screen printing juga telah digunakan selama puluhan tahun dalam produksi tekstil, poster, dan berbagai produk komersial.

Dalam konteks pemberdayaan masyarakat, pelatihan di tingkat kelurahan dapat menjadi tahap awal untuk mempertemukan keterampilan, kebutuhan pasar, dan kesempatan berusaha. Karena itu, Pemerintah Kelurahan Waruruma berharap peserta dapat memanfaatkan pengetahuan yang diperoleh untuk mengembangkan usaha secara berkelanjutan, meningkatkan kemandirian, serta ikut memperkuat perekonomian masyarakat setempat. (*)